

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Implementasi standar pengelolaan pendidikan di sekolah-sekolah dasar di bawah dinas Pendidikan kota Medan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain : (1) dukungan komunikasi, (2) dukungan sumber daya, (3) dukungan sikap aparatur, dan (4) dukungan struktur birokrasi. Setiap faktor saling terkait satu dengan yang lainnya, dan yang dijadikan sebagai tolak ukur menilai keberhasilan implementasi standar pengelolaan Pendidikan sekolah-sekolah dasar di bawah Dinas Pendidikan Kota Medan apakah sudah sesuai dengan arah kebijakan atau tidak.

1. Dukungan komunikasi

Dukungan komunikasi terhadap implementasi kebijakan standar pengelolaan Pendidikan sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan terutama untuk aspek transmisi dan konsistensi komunikasi. Sedangkan untuk aspek kejelasan informasi mengenai standar pengelolaan Pendidikan belum dilaksanakan mengingat tidak secara khusus disampaikan oleh pejabat Dinas Pendidikan.

2. Dukungan sumber daya

Dinas Pendidikan memiliki sumber daya yang memadai dan mendukung implementasi kebijakan standar pengelolaan Pendidikan bagi sekolah-sekolah

di bawahnya. Dengan sumber daya manusia (staf), sumber daya informasi, hingga sumber daya berupa fasilitas yang semuanya tersedia di setiap sekolah.

3. Dukungan sikap aparatur

Kecenderungan sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan standar pengelolaan dalam hal ini kepala-kepala sekolah, staf / birokrasi di sekolah menunjukkan komitmen untuk menyukseskan program kerja yang telah disusun. Terbukti dengan keterlibatan aktif para personil / staf dalam setiap program yang dijalankan. Kalaupun ada yang melakukan tindakan-tindakan melanggar komitmen awal biasanya muncul karena kurang jelasnya informasi yang diterima sehingga menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Hal ini dapat diselesaikan dengan memberikan informasi yang jelas.

4. Dukungan struktur birokrasi

Struktur birokrasi di sekolah dasar di bawah dinas Pendidikan tidaklah sekompleks struktur birokrasi pada lembaga-lembaga lain. Personalia yang ada di sekolah-sekolah dasar tidak sebanyak lembaga-lembaga atau dinas-dinas lain. Sehingga struktur organisasi yang ada di sekolah-sekolah dasar hanya kepala sekolah, tata usaha, wakil kepala sekolah, wali-wali kelas, dan guru-guru bidang studi. Kalau pun di sekolah yang cukup ramai personilnya ada juga yang ditambah dengan koordinator-koordinator program. Namun masing-masing telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang didasarkan kepada penerbitan surat keputusan pengangkatan atau surat tugas.

Penyelenggaraan tugas-tugas diatur dengan SOP yang dimiliki untuk memudahkan dan menyeragamkan aktifitas-aktifitas yang dilakukan.

Meskipun sudah punya SOP tapi setiap personalia masih diberi keluwesan untuk melakukan improvisasi selama tidak melenceng dari SOP yang telah disusun.

5. Konsistensi implementasi kebijakan standar pengelolaan Pendidikan di sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kota Medan

Sekolah-sekolah Dasar di bawah Dinas Pendidikan Kota Medan telah mampu dan memiliki dokumen pengelolaan sebagaimana petunjuk pelaksanaan standar pengelolaan Pendidikan, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan program kerja, dan (3) evaluasi.

5.2. Implikasi

Implikasi dari temuan di lapangan selama penelitian ini, dukungan komunikasi, sumber daya, sikap aparatur, dan struktur birokrasi terhadap konsistensi implementasi kebijakan standar pengelolaan Pendidikan di sekolah-sekolah dasar di bawah Dinas Pendidikan Kota Medan adalah

1. Dinas Pendidikan menjadi pihak yang memastikan sekolah-sekolah di bawahnya untuk melaksanakan kebijakan standar pengelolaan di sekolahnya masing-masing. Untuk itu, Dinas Pendidikan bertanggungjawab untuk memperkuat dukungannya kepada sekolah-sekolah melalui dukungan komunikasi yang efektif, dukungan sumber daya yang memadai, dukungan pembinaan terhadap aparatur, dan dukungan terhadap penguatan struktur birokrasi di sekolah
2. Kepala sekolah harus kreatif untuk mencari informasi dari berbagai sumber mengingat minimnya informasi mengenai standar pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Disamping itu, kepala sekolah

dituntut untuk memperkuat dukungan komunikasi antar sesama personalia di sekolah, memperkuat dukungan berbagai sumber daya yang tersedia di sekolah, memperkuat pembinaan sikap aparatur di sekolah, dan mengefektifkan struktur birokrasinya.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Pendidikan meningkatkan pembinaannya terhadap sekolah-sekolah di bawahnya. Terutama kepada sekolah-sekolah yang baru berdiri atau baru mengajukan penerbitan izin operasionalnya.
- 2) Kepala sekolah harus senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan baik secara langsung kepada Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah maupun melalui pengawas-pengawas sekolah terkait bagaimana implementasi standar pengelolaan yang diterapkan di sekolahnya.
- 3) Kepala sekolah hendaknya memberikan reward yang pantas dan menggugah rasa motivasi para staf di sekolahnya agar lebih baik lagi menunjukkan dukungannya dalam menyukseskan program-program yang sudah disusun.
- 4) Program-program yang disusun oleh kepala sekolah hendaknyalah berbasis kebutuhan dan skala prioritas. Terutama program-program peningkatan mutu yang memang berdampak langsung pada peningkatan mutu peserta didik maupun mutu para pendidiknya.

- 5) Dalam rangka pengelolaan keuangan, hendaklah kepala sekolah mendahulukan prinsip manajemen terbuka terutama kepada pihak-pihak yang memang menjadi stake holder sekolah. Dalam hal ini komite sekolah ataupun paguyuban-paguyuban kelas.
- 6) Kepala sekolah hendaknya memperluas jaringan kerjanya tidak hanya kepada Dinas Pendidikan saja, tapi juga kepada lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain yang memiliki perhatian terhadap perkembangan dunia Pendidikan dengan menjalin kerjasama yang beragam.